

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka yang akan penulis sajikan pada bab ini yaitu berupa kerangka pemikiran dan pengajuan hipotesis. Tinjauan pustaka ini terdiri dari teori-teori yang berkaitan dengan variabel yang diteliti, dan penelitian terdahulu yang dijadikan acuan serta perbandingan dalam melakukan penelitian. Penulisan selanjutnya adalah pembahasan kerangka pemikiran teoritis yang menjelaskan model serta korelasi antara variabel bebas (independen) dengan variabel terikat (dependen), serta pengajuan hipotesis dalam penelitian.

2.1.1 Pendapatan Asli Daerah

2.1.1.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, pendapatan daerah yang berasal dari sumber-sumber di dalam daerah itu sendiri dan dikumpulkan sesuai dengan peraturan daerah dan hukum yang berlaku, dianggap sebagai pendapatan asli daerah. Pendapatan ini merupakan sumber utama pemasukan daerah yang digunakan sebagai modal dasar pemerintah daerah untuk mendanai pembangunan dan kegiatan-kegiatan di daerah, sehingga mengurangi ketergantungan terhadap dana dari pemerintah pusat.

PAD bertujuan untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004,

pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan desentralisasi (Miragustia Mayza, dkk 2015:11).

2.1.1.2 Sumber Pendapatan Asli Daerah

Secara umum penerimaan pemerintah dibutuhkan guna mendanai pengeluaran pemerintah. Secara garis besar, penerimaan pemerintah bisa dibedakan antara penerimaan pajak dan bukan pajak. Penerimaan bukan pajak, seperti penerimaan pemerintah yang diperoleh dari pinjaman pemerintah, baik pinjaman yang berasal dari dalam negeri maupun pinjaman pemerintah yang berasal dari luar negeri.

Klasifikasi PAD yang terbaru berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 terdiri atas: pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

2.1.1.2.1 Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan pajak negara yang diserahkan kepada daerah dan dinyatakan sebagai pajak daerah dengan undang-undang (Siagian, 1985). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 pajak daerah diartikan sebagai iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan

peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

1. Jenis pajak Provinsi terdiri dari:

a. Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak kendaraan bermotor yaitu pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor.

b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Bea balik nama kendaraan bermotor yaitu jenis pajak yang berasal dari penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat dari perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Pajak bahan bakar kendaraan bermotor yaitu pajak dari penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor. Bahan bakar kendaraan bermotor yaitu segala jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor.

d. Pajak Air Permukaan

Pajak air permukaan yaitu pajak dari pengambilan dan atau pemanfaatan air permukaan. Air permukaan merupakan segala air yang ada permukaan tanah, namun tidak termasuk di dalamnya air laut.

e. Pajak Rokok

Pajak rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah.

2. Jenis pajak Kabupaten/Kota terdiri dari:

a. Pajak Hotel

Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan atau peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengandipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, wisma pariwisata, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah lebih dari 10 (sepuluh) kamar.

b. Pajak Restoran

Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering.

c. Pajak Hiburan

Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan keramaian yang dinikmati dengan dipungut biaya.

d. Pajak Reklame

Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang berbentuk dan corak ragamnya dirancang dengan tujuan komersial untuk memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan dinikmati oleh umum.

e. Pajak Penerangan Jalan

Pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.

f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pajak mineral bukan logam dan batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam didalam dan permukaan bumi untuk dapat dimanfaatkan. Mineral bukan logam dan batuan adalah sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.

g. Pajak Parkir

Pajak parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha ataupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.

h. Pajak Air Tanah

Pajak air tanah adalah pajak atas pengambilan dan pemanfaatan air tanah. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.

i. Pajak Sarang Burung Walet

Pajak sarang burung walet adalah pajak dari kegiatan pengambilan atau pengusahaan sarang burung walet.

j. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan

Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan adalah atas pajak atas bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai, atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang dipakai guna kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan. Bumi merupakan permukaan bumi yang terdiri dari tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota. Bangunan merupakan konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah atau perairan pedalaman atau laut.

k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah pajak yang berasal dari perolehan hak atas tanah dan bangunan. Perolehan hak atas tanah atau bangunan yaitu kejadian atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah atau bangunan oleh orang pribadi atau badan. Hak atas tanah dan bangunan yaitu hak atas tanah, termasuk didalamnya hak pengelolaan, beserta dengan bangunan di atasnya, sebagaimana yang dimaksudkan didalam undang-undang bidang pertanahan dan bangunan.

Pengelompokan pajak didasarkan atas sifat atau ciri tertentu pada setiap pajak, sehingga dapat dikelompokan menjadi (Waluyo dan Ilyas, 2002:11):

1. Pembagian berdasarkan golongan

- a. Pajak langsung adalah pajak yang pembebenannya tidak dapat dilimpahkan ke pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung wajib pajak yang bersangkutan. Pajak ini dikenakan secara berulang-ulang pada waktu tertentu berdasarkan ketetapan waktu. Sebagai contoh adalah pajak penghasilan.

b. Pajak tidak langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan ke pihak lain dan pajak ini tidak dipungut secara periodik tetapi hanya apabila terjadi peristiwa tertentu. Sebagai contoh adalah pajak pertambahan nilai.

2. Pembagian menurut sifatnya

a. Pajak subjektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan dari wajib pajak. Sebagai contoh adalah pajak penghasilan.

b. Pajak objektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan dari wajib pajak. Sebagai contoh adalah pajak pertambahan nilai, pajak kendaraan bermotor, dan pajak penjualan atas barang mewah.

3. Pembagian menurut pemungutannya

a. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Sebagai contoh adalah pajak bumi dan bangunan, pajak pertambahan nilai, dan pajak penjualan atas barang mewah.

b. Pajak daerah adalah pajak yang di pungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Sebagai contoh adalah pajak kendaraan, pajak bea balik nama kendaraan bermotor, pajak hotel, pajak restoran, dan lainnya.

Tarif jenis pajak sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 34 Tahun 2000 Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan paling tinggi sebesar:

1. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air 5% (lima persen)
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air 10% (sepuluh persen)
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 5% (lima persen)
4. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan 20% (dua puluh persen)
5. Pajak Hotel 10% (sepuluh persen)
6. Pajak Restoran 10% (sepuluh persen)
7. Pajak Hiburan 35% (tiga puluh lima persen)
8. Pajak Reklame 25 % (dua puluh lima persen)
9. Pajak Penerangan Jalan 10% (sepuluh persen)
10. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C 20% (dua puluh persen)
11. Pajak Parkir 20% (dua puluh persen).

2.1.1.2.2 Retribusi Daerah

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran/pemakaian karena memperoleh suatu jasa atau fasilitas yang diberikan secara langsung dan nyata oleh daerah kepada pembayar/pemakai. Dalam retribusi daerah, terdapat Objek retribusi daerah yaitu berbagai jenis jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah. Tidak semua yang diberikan oleh pemerintah daerah dapat dipungut retribusinya, tetapi hanya jenis-jenis jasa tertentu

yang menurut pertimbangan sosial ekonomi layak dijadikan sebagai objek retribusi, yang dikelompokkan dalam 3 golongan, yaitu jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu.

Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Sedangkan Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial. Selanjutnya Retribusi Perizinan tertentu yaitu kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang prasarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu. Retribusi memiliki sifat-sifat sebagai berikut, diantaranya:

1. Adanya timbal balik atau imbalan secara langsung kepada pembayar. Imbalan dari retribusi yang dibayarkan dapat langsung dinikmati oleh pembayar, yaitu berupa pelayanan dari pemda yang memungut retribusi.
2. Retribusi dapat dipaksakan. Retribusi dapat dipaksakan bersifat ekonomis, artinya masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan atau prestasi dari pemerintah, maka wajib membayar retribusi.

2.1.1.2.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 mengklasifikasi jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah atau disebut BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik Negara (BUMN) dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta maupun kelompok masyarakat.

2.1.1.2.4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Menurut UU Pasal 6 No. 33 Tahun 2004 tentang Pendapatan Asli Daerah yang sah menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk kedalam jenis pajak dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah yang sah meliputi:

1. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.
2. Jasa Giro.
3. Pendapatan Bunga.
4. Keuntungan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.
5. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan, pengadaan barang ataupun jasa oleh pemerintah.

2.1.2 Pariwisata

2.1.2.1 Pengertian Pariwisata

Pengertian pariwisata berdasarkan Undang-Undang RI No.10 Tahun 2009, tentang kepariwisataan disebutkan bahwa pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sedangkan kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multi dimensi serta multi disiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dengan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, dan pengusaha.

Secara etimologi, kata pariwisata berasal dari bahasa sansekerta yaitu kata “pari” yang berarti banyak; berkali-kali; berputar-putar, dan kata “wisata” yang bermakna perjalanan; bepergian. Pariwisata dalam bahasa Inggris adalah “tour” yang diartikan dalam kamus sebagai perjalanan atau bepergian untuk kesenangan mengunjungi berbagai tempat yang menarik, atau kunjungan singkat atau kunjungan lewat suatu tempat (Spillane J. J., 2002). Pariwisata dapat juga diartikan sebagai kegiatan melakukan perjalanan dengan tujuan mendapatkan kenikmatan, mencari kepuasan, mengetahui sesuatu, memperbaiki kesehatan, menikmati olahraga, menunaikan tugas, berziarah, dan lain-lain.

Istilah pariwisata ini mulai dipakai setelah tahun 1960 untuk mengganti istilah bertamasya, melancong, atau piknik dan memberi pengertian yang sederhana dan sempit yaitu bepergian ke suatu tempat yang tidak jauh untuk sekedar bersantai. Sedangkan dalam era saat ini, perjalanan yang dilakukan erat kaitannya dengan

mobilitas pergerakan manusia, maka dari itu pariwisata mengandung nilai ekonomi yang tinggi.

2.1.2.2 Jenis Pariwisata

Ada banyak jenis pariwisata yang ditentukan menurut motif tujuan perjalanan, menurut James J, Spillane (1987: 28-31), pariwisata terdiri dari enam jenis yaitu:

1. Pariwisata Untuk Menikmati Perjalanan (*Pleasure Tourism*)

Jenis pariwisata ini bertujuan untuk berlibur, mencari udara segar, memenuhi keingintahuan, mengendorkan ketegangan saraf, melihat sesuatu yang baru, menikmati keindahan alam, dan mendapatkan kedamaian.

2. Pariwisata Untuk Rekreasi (*Recreation Tourism*)

Jenis pariwisata ini dilakukan sebagai pemanfaatan hari-hari libur untuk beristirahat, memulihkan kesegaran jasmani dan rohani serta menyegarkan keletihan.

3. Pariwisata Untuk Kebudayaan (*Cultural Tourism*)

Jenis pariwisata ini ditandai dengan serangkaian motivasi seperti keinginan belajar di pusat riset, mempelajari adat-istiadat, mengunjungi monumen bersejarah dan peninggalan purbakala serta ikut festival seni musik.

4. Pariwisata Untuk Olah Raga (*Sports Tourism*)

Jenis pariwisata ini terdiri dari dua kategori, yaitu pariwisata olah raga besar seperti Olimpiade, Asian Games, dan SEA Games serta bagi mereka yang ingin berlatih atau mempraktikkan sendiri, seperti mendaki gunung, panjat tebing, berkuda, berburu, rafting, dan memancing.

5. Pariwisata Untuk Urusan Usaha Dagang (*Business Tourism*)

Jenis pariwisata ini biasanya dilakukan para pengusaha atau industrialis antara lain mencakup kunjungan ke pameran dan instalasi teknis.

6. Pariwisata Untuk Berkonvensi (*Convention Tourism*)

Jenis pariwisata ini berhubungan dengan konferensi, simposium, sidang dan seminar internasional.

2.1.2.3 Pendapatan Pariwisata

Pendapatan pariwisata adalah bagian dari pendapatan asli daerah yang berasal dari kegiatan kepariwisataan, seperti retribusi tempat rekreasi dan olahraga, pajak hotel dan restoran, pajak hiburan, dan lainnya dengan satuan rupiah pertahun (Yoeti, 1996).

Pendapatan pariwisata adalah pendapatan yang diperoleh dari hal-hal yang dapat dikategorikan seperti di bawah ini:

1. Pajak Hotel

Pungutan wajib yang dibebankan kepada tiap-tiap hotel yang telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai wajib pajak.

2. Pajak Restoran

Pungutan wajib pajak yang dibebankan kepada setiap restoran yang telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai wajib pajak.

3. Pajak Hiburan

Pungutan wajib yang dibebankan kepada setiap tempat hiburan yang telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai wajib pajak.

4. Retribusi Kios

Pungutan daerah yang dikenakan sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin menempati kios di tempat tertentu.

5. Retribusi Kamar Kecil

Pungutan daerah yang dikenakan sebagai pembayaran atas jasa pengelolaan fasilitas kamar kecil di destinasi wisata.

6. Retribusi Iklan

Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa penggunaan fasilitas umum untuk kepentingan berpromosi atas suatu produk tertentu.

7. Tiket Masuk Destinasi Wisata

Pungutan yang dikenakan kepada pengunjung yang masuk kedalam suatu destinasi wisata tertentu.

8. Retribusi Parkir Destinasi Wisata

Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa penggunaan fasilitas umum untuk memarkir kendaraan.

9. Pajak Pembangunan 1

Pungutan wajib pajak yang diberikan kepada setiap hotel dan restoran yang telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai wajib pajak.

10. Penerimaan dari Dinas Pariwisata Setempat

Penerimaan daerah yang didapat dari Dinas Pariwisata.

2.1.2.4 Penawaran Pariwisata

Penawaran dalam pariwisata terdiri dari segala macam produk dan pelayanan/jasa yang dihasilkan oleh kelompok perusahaan industri pariwisata sebagai pemasok, yang ditawarkan baik kepada wisatawan yang datang secara

langsung atau yang membeli melalui Agen Perjalanan (AP) atau Biro Perjalanan Wisata (BPW) sebagai perantara (Yoeti, 2008).

Menurut James J, Spillane (1987:60) perkembangan industri pariwisata berpengaruh positif terhadap perluasan kesempatan kerja, banyak dari usaha wisata yang membutuhkan tenaga kerja karena sifat industri pariwisata adalah sektor berbasis padat karya yang dapat menyerap tenaga kerja dan meningkatkan pendapatan penduduk. Aspek-aspek penawaran pariwisata antara lain (Spillane J. J., 1987):

1. Proses Produksi Industri Pariwisata Peningkatan pengembangan pariwisata sebagai industri ditunjang oleh berbagai macam usaha yang perlu untuk diatur secara terpadu, seperti:
 - a. Promosi untuk memperkenalkan objek wisata
 - b. Transportasi yang lancar
 - c. Kemudahan keimigrasian atau birokrasi
 - d. Akomodasi yang menjamin penginapan yang nyaman
 - e. Pemandu wisata yang cakap
 - f. Penawaran barang dan jasa dengan mutu terjamin dan tarif harga yang wajar
 - g. Pengisian waktu dengan atraksi-atraksi yang menarik
 - h. Kondisi kebersihan dan kesehatan lingkungan hidup
2. Pentingnya Tenaga Kerja dan Penyediaan Lapangan Pekerjaan

Perkembangan pariwisata berpengaruh positif pada ekspansi kesempatan kerja. Karena tersedianya lapangan pekerjaan, maka akan menarik para

pendatang baru dari luar daerah, hal tersebut adalah imbas dari berkembangnya suatu daerah pariwisata.

3. Penyediaan Infrastruktur/Sarana Prasarana

Karena adanya motivasi yang mendorong orang untuk melakukan perjalanan, maka akan menyebabkan permintaan-permintaan yang berkaitan dengansarana prasarana perjalanan dan perhubungan, sarana akomodasi dan jasa-jasa, serta persediaan lainnya. Industri pariwisata juga membutuhkan prasarana ekonomi, antara lain jalan raya, jembatan, terminal, pelabuhan, lapangan udara. Begitu pula dengan prasarana yang bersifat *public utilities*, misalnya fasilitas olahraga dan rekreasi, pos dan telekomunikasi, *money changer*, perusahaan asuransi, periklanan, percetakan, dan banyak sektor perekonomian lainnya.

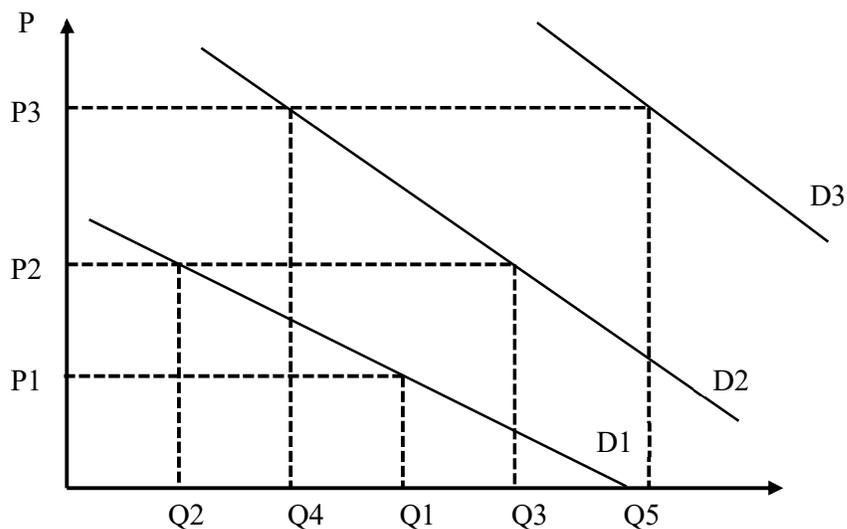
4. Penawaran Jasa Keuangan

Tata cara hidup yang tradisional dari sebuah kelompok masyarakat juga menjadi salah satu sumber yang amat penting untuk ditawarkan kepada para wisatawan. Bagaimana kebiasaan hidupnya, adat istiadatnya, seluruhnya menjadi daya tarik bagi wisatawan untuk datang ke suatu daerah. Hal itu dapat dijadikan sebagai *event* yang bisa dijual oleh pemerintah daerah setempat (Yoeti, 2008).

2.1.2.5 Permintaan Pariwisata

Pariwisata dilihat sebagai suatu jenis usaha yang memiliki nilai ekonomi, maka pariwisata adalah sebagai suatu proses yang dapat menciptakan nilai tambahan terhadap barang dan jasa sebagai satu kesatuan produk yang nyata (*real*

goods) ataupun yang berupa jasa-jasa (*service*) yang dihasilkan melalui proses produksi. Disisi lain, pariwisata dianggap seperti suatu jasa yang diminati (*preferend goods or service*), sebab lebih banyak dilakukan saat pendapatan meningkat. Ketika ada banyak keluarga yang menduduki kelompok pendapatan lebih tinggi, maka permintaan untuk berwisata akan meningkat lebih cepat dari pendapatan, dapat digambarkan dengan kurva permintaan individual Veblen seperti yang terlihat pada Gambar 2.1.



Gambar 2.1

Kurva Permintaan Individual Veblen

Sumber: Lundberg (1997)

Apabila harga yang ditetapkan adalah P_1 , maka produk yang terjual adalah Q_1 . Apabila harga ditingkatkan menjadi P_2 menurut kurva D_1 , maka harga jumlah barang yang dibeli akan turun menjadi Q_2 . Namun hal seperti ini tidak terjadi pada kurva Veblen, sebab konsumen mengerti pentingnya bagi produk tersebut dan kenyataannya konsumen justru akan membeli dalam jumlah yang banyak sebesar

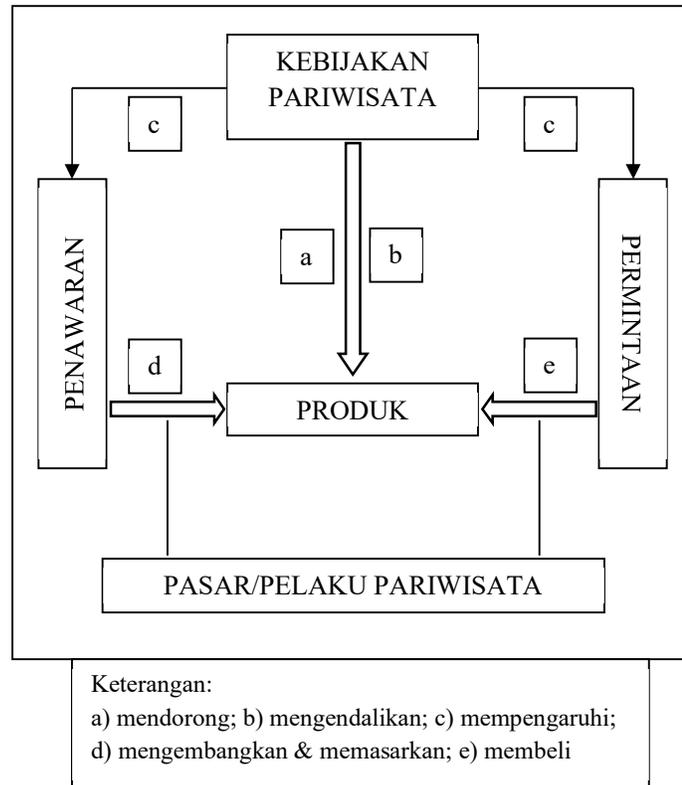
Q3. Oleh sebab itu, harga baru tersebut telah meningkatkan nilai kesenangan kualitas pelayanan atau pengalaman yang diberikan. Dalam hal ini, kurva permintaan bukan bergeser kebawah, akan tetapi bergeser ke D2 sebagai akibat dari pengaruh permintaan Veblen. Penurunan harga justru hanya akan meningkatkan sedikit jumlah barang yang dibeli, dimana pengaruhnya hanya menurut kurva permintaan baru D2. Ketika dinaikkan lagi menjadi P3, maka harga akan bergeser lagi, namun tindakan ini tidaklah membuat kurva permintaan mengalami penurunan menjadi Q4, akan tetapi justru terjadi peningkatan permintaan menjadi Q5.

2.1.2.6 Ekonomi Pariwisata

Menjurus kepada beberapa prinsip ekonomi, yakni:

1. Wisatawan menghadapi masalah Tradeoff yang dimaksudkan disini yaitu tidak ada yang gratis di dunia ini (*there's no such thing as free lunch*). Untuk memperoleh sesuatu yang kita sukai, kita biasanya harus menyerahkan hal lain yang juga kita sukai. Membuat keputusan menyebabkan *tradeoff* (pertukaran kepentingan), yaitu merelakan satu hal satu untuk hal yang lain. Dalam melakukan perjalanan, wisatawan harus merelakan beberapa kepentingan, seperti halnya mengorbankan uang untuk berwisata membayar segala akomodasi, dari pada harus menabung dan mendapatkan keuntungan yang tinggi, sehingga dapat membeli apa yang diinginkan. Berarti akan ada biaya yang harus dikorbankan untuk memperoleh sesuatu.
2. Standar hidup suatu Negara bergantung pada kemampuannya menghasilkan barang dan jasa. Jika suatu daerah atau Negara dapat mengelola dan mengembangkan sektor pariwisatanya dengan baik, ini akan berdampak pada

perekonomian Negara atau daerah dengan respon yang positif. Suatu daerah akan menghasilkan barang berupa penawaran objek wisata ataupun yang berkaitan dengan kepariwisataan jika di kelola dengan baik, maka akan mendorong para wisatawan untuk berkunjung ke daerah tersebut.



Gambar 2.2

Sistem Kepariwisataan

Sumber: Damanik dan Weber (2006)

Berdasarkan gambar diatas menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah di sektor pariwisata akan sangat mempengaruhi permintaan dan penawaran akan wisata. Penawaran pariwisata yang tinggi akan mengembangkan produk-produk wisata, sehingga pariwisata akan di kenal oleh mata dunia. Permintaan yang tinggi dapat mengendalikan di segi ekonomi, yaitu jumlah uang yang beredar. Sehingga

permintaan yang tinggi akan produk wisata maka akan dapat juga dikendalikan oleh kebijakan pariwisata.

2.1.2.7 Dampak Pariwisata

Salah satu motivasi utama sebuah negara mempromosikan dirinya sebagai negara dengan tujuan wisata adalah timbulnya kemajuan dalam ekonomi, terutama bagi negara-negara berkembang. Bersamaan dengan dampak lainnya, peningkatan ekonomi yang begitu pesat juga terjadi dengan berbagai keuntungan dan kerugian. Dampak besar pariwisata terlihat dari data World Tourism Organization, pada tahun 2000, 698 juta orang melakukan perjalanan ke luar negeri dan menghabiskan lebih dari 478 juta US dollar. Gabungan dari pendapatan pariwisata internasional dengan pendapatan transportasi, maka menghasilkan lebih dari 575 juta US dollar, yang membuat pariwisata menjadi penghasil ekspor terbesar di dunia diikuti oleh produk otomotif, bahan kimia, minyak bumi, dan makanan. Namun, banyak kerugian tersembunyi dari pariwisata yaitu, adanya dampak-dampak pada ekonomi yang tidak diharapkan oleh penduduk setempat. Seringkali keuntungan pariwisata sebuah negara maju lebih tinggi dari negara berkembang. Padahal negara berkembang lebih membutuhkan pendapatan tambahan, pekerjaan, dan peningkatan standar hidup melalui pariwisata. Berdasarkan kenyataan tersebut, berbagai alasan muncul antara lain, karena adanya transfer besar-besaran pendapatan pariwisata dari negara tuan rumah, kemudian kurang diperhatikannya usaha dan produk dalam negeri.

Sebagai kegiatan atau industri yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, pariwisata tentu akan memberikan dampak atau berpengaruh terhadap masyarakat, baik itu positif maupun negatif. Meskipun secara garis besar manfaat

positif pariwisata lebih banyak dirasakan dibandingkan manfaat negatif, tidak ada salahnya untuk selalu berupaya menekan dampak negatif yang ada dan mengantisipasi dampak negatif yang mungkin terjadi, salah satu contohnya adalah mengembangkan pariwisata tanpa merusak tatanan yang ada, seperti mengubah fungsi lahan yang produktif seperti areal persawahan menjadi bangunan-bangunan untuk kepentingan pariwisata, biarkan pariwisata berjalan dengan apa yang sudah ada, biarkan wisatawan menikmati kearifan lokal yang ada, karena jika itu dibiarkan suatu saat terjadi ketergantungan masyarakat terhadap pariwisata yang tentunya tidak baik karena bagaimanapun juga harus kita sadari bahwa pariwisata adalah industri yang sangat rapuh.

Sektor pariwisata memberikan kontribusi kepada daerah lewat pajak daerah, laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta pendapatan lain yang sah berupa pemberian hak atas tanah pemerintah. Dari pajak daerah itu sendiri, sektor pariwisata memberikan sumbangan berupa pajak hotel dan restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak minuman beralkohol serta pajak pemanfaatan air bawah tanah.

2.1.2.8 Peranan Sektor Pariwisata terhadap Pendapatan Daerah

Salah satu upaya untuk meningkatkan penerimaan daerah yaitu dengan mengoptimalkan potensi dalam sektor pariwisata. Hubungan industri pariwisata dengan penerimaan daerah berjalan melalui jalur PAD dan bagi hasil pajak/bukan pajak. Menurut Tambunan yang dikutip oleh Badrudin (2001), bahwa industri pariwisata yang menjadi sumber PAD adalah industri pariwisata milik masyarakat daerah (*Community Tourism Development* atau CTD). Dengan mengembangkan CTD pemerintah daerah dapat memperoleh peluang penerimaan pajak dan beragam

retribusi resmi dari kegiatan industri pariwisata yang bersifat multisektoral, yang meliputi hotel, restoran, usaha wisata, usaha perjalanan wisata, profesional convention organizer, pendidikan formal dan informal, pelatihan dan transportasi.

Semakin lama wisatawan tinggal di suatu daerah tujuan wisata, maka akan semakin banyak pula uang yang dibelanjakan di daerah tersebut, setidaknya untuk keperluan makan, minum dan penginapan selama tinggal disana. Segala macam kebutuhan wisatawan selama perjalanan wisatanya akan menimbulkan gejala konsumtif untuk produk-produk yang ada di daerah tujuan wisata. Dengan adanya kegiatan konsumtif baik dari wisatawan mancanegara maupun domestik, maka akan memperbesar pendapatan dari sektor pariwisata suatu daerah (Austriana, 2005).

Belanja wisatawan di daerah tujuan wisatanya akan meningkatkan pendapatan dan pemerataan pada masyarakat setempat secara langsung maupun tidak langsung melalui dampak berganda (*multiplier effect*) (Spillane J. J., 1987). Dimana pada daerah tersebut berkesempatan untuk menambah pendapatannya, dengan cara menjual barang dan jasa, seperti restoran, hotel, pramuwisata dan barang-barang souvenir. Oleh sebab itu, semakin tingginya arus kunjungan wisatawan ke Provinsi Jawa Barat, maka pendapatan sektor pariwisata seluruh Provinsi Jawa Barat akan semakin meningkat pula.

2.1.3 Wisatawan

2.1.3.1 Pengertian Wisatawan

Menurut undang-undang nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan disebutkan wisatawan adalah orang yang melakukan wisata. Sedangkan menurut Sihite (2000:49) pengertian wisatawan dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Wisatawan Mancanegara ialah warga negara suatu negara yang mengadakan perjalanan wisata keluar lingkungan dari negaranya (memasuki negara lain).
2. Wisatawan Domestik ialah Wisatawan dalam negeri.

Menurut Nawawi (2003) menyatakan adapun beberapa manfaat jika banyak wisatawan mengunjungi suatu tujuan wisata tertentu, salah satunya melalui penerimaan berbagai retribusi dan pajak yang dapat di pungut oleh pemerintah daerah setempat. Semakin lama wisatawan menginap dalam setiap kunjungan wisata, maka secara langsung pengaruh ekonomi dari keberadaan wisatawan tersebut juga semakin meningkat. Salah satu pengaruh ekonomi dalam kegiatan pariwisata di suatu daerah terletak pada purchasing power yang diperoleh masyarakat di daerah penerimaan wisatawan melalui pengeluaran dari wisatawan yang cenderung membelanjakan lebih banyak uang daripada yang dilakukan wisatawan tersebut di daerah asalnya. Beberapa wisatawan ini meliputi:

1. Orang-orang yang sedang mengadakan perjalanan untuk bersenang-senang.
2. Orang-orang yang sedang mengadakan perjalanan untuk pertemuan, konferensi, musyawarah, atau sebagai utusan berbagai badan/perusahaan.
3. Orang-orang yang sedang mengadakan perjalanan dengan maksud bisnis perjabat pemerintahan dan militer beserta keluarga yang lain.

2.1.3.2 Tujuan Berwisata

Tujuan wisata untuk melakukan perjalanan wisata. Ada beberapa macam salahsatunya untuk bersenang-senang didaerah tujuan wisata tertentu. Berikut ini merupakan jenis-jenis atau karakteristik wisatawan:

1. Wisatawa Lokal (local tourist), yaitu wisatawan yang melakukan perjalanan wisata ke daerah tujuan yang berasal dari dalam negeri.
2. Wisatawan Mancanegara (international tourist), yaitu wisatawan yang mengadakan perjalanan ke daerah tujuan wisata yang berasal dari luar negeri.
3. Holiday Tourist adalah wisatawan yang melakukan perjalanan ke daerah tujuan wisata dengan tujuan untuk bersenang-senang.
4. Business Tourist adalah wisatawan yang berpergian ke daerah tujuan wisata dengan tujuan untuk urusan dagang atau urusan profesi.
5. Common Interest Tourist adalah wisatawan yang berpergian ke daerah tujuan wisata dengan tujuan khusus seperti studi ilmu pengetahuan, mengunjungi sanak keluarga, berobat, dan lain-lain.
6. Individual Tourist adalah wisatawan yang berpergian ke daerah tujuan wisata secara mandiri.
7. Group Tourist adalah wisatawan yang berpergian kedaerah tujuan wisata secara bersama-sama atau berkelompok.

2.1.4 Hotel

2.1.4.1 Pengertian Hotel

Hotel adalah suatu perusahaan yang dikelola oleh pemiliknya dengan menyediakan makanan, minuman dan fasilitas kamar tidur untuk orang-orang yang

melakukan perjalanan dan mampu membayar dengan jumlah yang wajar sesuai dengan pelayanan yang diterima tanpa adanya perjanjian khusus (Sulastiyono, 2011:5).

Menurut Sugiarto dan Sulartiningrum (1996:8) pengertian hotel adalah suatu bangunan yang dikelola secara komersil guna memberikan fasilitas penginapan kepada masyarakat umum dengan fasilitas antara lain jasa penginapan, pelayanan barang bawaan, makanan dan minuman, penggunaan fasilitas perabot dan hiasan-hiasan yang ada didalamnya, serta jasa pencuci pakaian.

Menurut Lawson (1976:27) pengertian hotel adalah sarana tempat tinggal umum untuk wisatawan dengan memberikan pelayanan jasa kamar, penyedia makanan dan minuman, serta akomodasi dengan syarat pembayaran.

Dari pengertian diatas maka pengertian atau definisi hotel secara umum adalah badan usaha akomodasi atau perusahaan yang menyediakan pelayanan bagi masyarakat umum dengan fasilitas jasa penginapan, penyedia makanan dan minuman, jasa layanan kamar, serta jasa pencucian pakaian. Fasilitas ini diperuntukkan bagi mereka yang bermalam di hotel tersebut, atau mereka yang hanya menggunakan fasilitas tertentu yang dimiliki hotel tersebut.

Hotel memiliki beberapa karakteristik yang membuatnya berbeda dengan badan usaha yang lainnya seperti:

1. Hotel tergolong perusahaan yang padat modal serta padat karya yang artinya dalam pengelolaannya memerlukan modal yang besar dengan tenaga pekerja yang banyak.

2. Pelanggan diperlakukan seperti raja dan pelanggan juga diperlakukan seperti partner dalam usaha karena keuntungan yang didapat hotel sangat tergantung pada banyaknya pelanggan yang menggunakan fasilitas hotel tersebut.
3. Hotel berbeda dengan usaha yang lain, dimana dalam beroperasi hotel berlangsung selama 24 jam sehari tanpa adanya hari libur guna melayani pelanggan hotel dan masyarakat umum yang ingin menggunakan jasa hotel.
4. Sangat dipengaruhi oleh keadaan dan perubahan yang terjadi pada sektor ekonomi, politik, sosial, budaya, kesehatan, dan keamanan dimana hotel tersebut berada.

2.1.4.2 Klasifikasi Jenis-Jenis Hotel

2.1.4.2.1 Jenis-Jenis Hotel Berdasarkan Lokasi

1. City Hotel

City Hotel merupakan jenis hotel yang berada di kawasan pusat perkotaan dan umumnya lebih banyak ditemukan di kota-kota besar. City hotel biasanya berukuran besar dengan gedung bertingkat dan fasilitas bisnis dikarenakan tamu yang menginap di hotel jenis ini kebanyakan merupakan business traveler. Hal ini membuat jenis hotel ini juga kerap disebut sebagai business hotel atau hotel bisnis.

2. Motel (Motor Hotel)

Motel merupakan singkatan dari motor hotel. Dinamakan demikian karena jenis hotel satu ini diperuntukkan sebagai persinggahan sementara orang-orang yang tengah melakukan perjalanan jauh. Motel biasanya berada di tepi-tepi jalan antar kota atau daerah.

3. Resort Hotel

Resort Hotel adalah jenis hotel yang berada di luar pusat perkotaan dan berada di kawasan wisata dan juga rekreasi seperti pantai, pegunungan, tepi danau, dan sejenisnya.

4. Residentian Hotel

Sesuai dengan namanya, jenis hotel satu ini berlokasi di kawasan perumahan atau residentian yang jauh dari keramaian. Residential hotel biasanya menjadi pilihan untuk tamu-tamu yang berencana untuk tinggal dalam waktu yang cukup lama. Meski jauh dari keramaian, jenis hotel ini tetap berada dikawasan dengan akses yang mudah untuk menjangkau pusat aktifitas di kota tersebut.

5. Downtown Hotel

Downtown Hotel adalah jenis hotel yang berlokasi di pusat keramaian, yakni di kawasan perdagangan dan perbelanjaan. Jenis hotel ini biasanya ditunjukkan untuk business traveler yang memiliki tujuan perjalanan bisnis menyangkut perdagangan dan jual beli.

2.1.4.2.2 Jenis-Jenis Hotel Berdasarkan Kelas atau Bintang

1. Hotel Bintang Satu

Hotel berbintang satu ini memiliki jumlah kamar standar minimum 15 kamar dengan luas kamar standar minimum 20 m².

2. Hotel Bintang Dua

Hotel berbintang dua memiliki jumlah kamar standar minimum 20 kamar dengan luas kamar standar minimum 22 m², kamar suite minimum 1 kamar dengan luas kamar 44 m².

Fasilitas: Memiliki telepon dan televisi di dalam kamar, terdapat tempat olahraga dan restoran.

3. Hotel Bintang Tiga

Hotel berbintang tiga memiliki jumlah kamar standar minimum 30 kamar dengan luas kamar standar minimum 24 m², dan kamar suite minimum 2 kamar dengan luas kamar suite minimum 48 m².

Fasilitas: Memiliki telepon, televisi, dan AC didalam kamar, terdapat sarana rekreasi dan olahraga, restoran, dan bar serta menyediakan *Concierge Staff*.

4. Hotel Bintang Empat

Hotel berbintang empat memiliki jumlah kamar standar minimum 50 kamar dengan luas kamar standar minimum 24 m², dan kamar suite minimum 3 kamar dengan luas kamar suite minimum 48 m².

Fasilitas: Memiliki telepon, televisi, AC, serta penghangat air di dalam kamar, terdapat sarana rekreasi dan olahraga, rest area, restoran dan bar serta menyediakan *Concierge Staff*.

5. Hotel Bintang Lima

Hotel berbintang lima memiliki jumlah kamar standar minimum 100 kamar, dengan luas kamar standar minimum 26 m², dan kamar suite minimum 4 kamar dengan luas kamar suite minimum 52 m².

Fasilitas: Memiliki telepon, televisi, AC, serta penghangat air di dalam kamar, terdapat sarana rekreasi dan olahraga, rest area, restoran dan bar serta menyediakan *Concierge Staff* dan room service 24 jam.

2.1.4.3 Rata-Rata Lama Menginap Tamu

Menurut Badan Pusat Statistik rata-rata lama menginap baik tamu asing maupun tamu dalam negeri dihitung dengan cara menentukan banyaknya malam tempat tidur yang dipakai dengan banyaknya tamu yang datang untuk menginap.

Adapun formula yang digunakan dalam menghitung Rata-Rata Lama Menginap, sebagai berikut:

$$\text{RLM Tamu} \quad : \quad \frac{\text{Banyaknya Malam Tempat Tidur Yang Dipakai}}{\text{Banyaknya Tamu}}$$

$$\text{RLM Tamu Asing} \quad : \quad \frac{\text{Banyaknya Malam Tempat Tidur Yang Dipakai Tamu Asing}}{\text{Banyaknya Tamu Asing}}$$

$$\text{RLM Tamu DN} \quad : \quad \frac{\text{Banyaknya Malam Tempat Tidur Yang Dipakai Tamu DN}}{\text{Banyaknya Tamu DN}}$$

Keterangan:

RLM : Rata-Rata Lama Menginap

DN : Dalam Negeri

Fungsi dari penghitungan RLM untuk mengetahui berapa lama seseorang menginap di suatu akomodasi pada suatu waktu tertentu. Jenis hotel berdasarkan lama menginap, yaitu:

1. Transient Hotel

Hotel ini digunakan jika rata-rata lama menginap tamu sangatlah singkat, hanya sehari atau dua hari saja. Kebanyakan tamu yang melakukan perjalanan yang sangat jauh dan singgah di perhotelan untuk beristirahat hanya sebentar lalu melanjutkan perjalan lagi.

2. Residential Hotel

Kebanyakan rata-rata lama menginap tamu mencapai satu bulan, satu tahun bahkan lebih. Biasanya hotel seperti ini dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas seperti rumah pada umumnya seperti tempat mencuci, tempat menjemur, dapur dan lain sebagainya.

3. Semi Residential Hotel

Rata-rata lama menginap tamu di antara transient dan residential hotel, dimana tamu menginap tidak terlalu singkat dan juga tidak terlalu lama hanya mencapai tiga hari atau satu minggu lamanya.

Semakin lama tamu menginap maka akan semakin banyak pula biaya atau pembayaran yang akan di keluarkan. Hal ini akan berdampak baik bagi hotel yang di singgahi karena pendapatannya akan semakin meningkat dan juga akan memberikan kontribusi yang besar pada pendapatan daerah.

2.1.5 Rumah Makan dan Restoran

2.1.5.1 Pengertian Rumah Makan dan Restoran

Rumah Makan menurut Atmodjo (2005) definisi Rumah Makan adalah suatu tempat atau bangunan yang diorganisasikan secara komersial, yang menyelenggarakan pelayanan dengan baik kepada semua tamu, baik berupa kegiatan makan maupun minum. Definisi lain Rumah Makan atau Restoran adalah suatu tempat yang identik dengan jajaran meja-meja yang tersusun rapi, dengan kehadiran orang, timbulnya aroma semerbak dari dapur dan pelayanan pramusaji, berdentingnya bunyi-bunyi kecil karena persentuhan gelas-gelas kaca, porselin, menyebabkan suasana hidup di dalamnya (Sugiarto dan Sulartiningrum, 1996:77).

Menurut Rumekso (2002:2) pengertian restoran adalah tempat yang menyediakan makanan dan minuman untuk tamu, serta mempunyai fasilitas-fasilitas lain yang diperlukan, dan dikelola secara profesional untuk mendapatkan keuntungan.

Menurut Mary B. Gregoire (2010:11) mengemukakan berdasarkan tujuannya Restoran dibagi menjadi dua yaitu Onsite Foodservice yang secara operasional menjual makanan hanya untuk mendukung aktifitas utama dan biasanya tergolong nonprofit. Sedangkan Commercial Foodservice secara operasional menjual makanan adalah prioritas utama dan profit oriented.

Pengertian Restoran secara umum adalah suatu tempat atau bangunan yang diorganisir secara komersil yang menyelenggarakan pelayanan dengan baik, berupa makanan dan minuman.

2.1.5.2 Jenis-Jenis Restoran

1. Coffe Shop atau Brasserie

Coffe Shop atau Brasserie adalah suatu restoran yang pada umumnya berhubungan dengan hotel, suatu tempat dimana tamu bias mendapatkan makan pagi, makan siang, dan makan malam secara cepat. Pada umumnya sistem pelayanannya adalah dengan *American Service* dimana yang diutamakan adalah kecepatan. *Ready on plate service* artinya makanan sudah diatur dan disiapkan diatas piring. Kadang-kadang penyajiannya dilakukan dengan cara buffet atau prasmanan.

2. Cafeteria atau Café

Cafeteria atau Café adalah suatu restoran kecil yang mengutamakan penjualan cake (kue), sandwich (roti isi), kopi dan teh. Pilihan makanannya terbatas dan tidak menjual minuman beralkohol.

3. Canteen

Canteen adalah restoran yang berhubungan dengan kantor, pabrik, atau sekolah tempat dimana para pekerja dan pelajar bisa mendapatkan makan siang dan coffe break. Yaitu acara minum kopi disertai makanan ringan untuk selingan jam kerja, jam belajar, ataupun acara rapat dan seminar.

4. Continental Restaurant

Continental Restaurant adalah suatu restoran yang menitik beratkan hidangan continental pilihan dengan pelayanan elaborate atau megah. Suasannya santai, susunannya agak rumit, disediakan bagi tamu yang ingin makan secara santai atau relax.

5. Carvery

Carvery adalah suatu restoran yang sering berhubungan dengan hotel dimana para tamu dapat mengiris sendiri hidangan pangang sebanyaknya yang mereka inginkan dengan harga hidangan yang sudah ditetapkan.

6. Dining room

Dining room terdapat dihotel kecil, Motel, atau Inn, merupakan tempat yang tidak lebih ekonomis daripada tempat makan biasa. Dining room pada dasarnya disediakan untuk para tamu yang tinggal di hotel tersebut, namun terbuka juga untuk umum.

7. Fish and Chip Shop

Fish and Chip Shop adalah suatu restoran yang banyak terdapat di Inggris, dimana kita dapat membeli macam-macam kripik dan ikan goreng, biasanya berupa ikan cod dibungkus dalam kertas dan dibawa pergi, jadi tidak dinikmati di tempat.

8. Grill Room

Grill Room adalah suatu restoran yang menyediakan bermacam-macam daging panggang. Pada umumnya antara restoran dengan dapur dibatasi oleh sekat dinding kaca sehingga para tamu dapat memilih sendiri potongan daging

2.1.6 Pandemi COVID-19

2.1.6.1 Pengertian Pandemi COVID-19

Pandemi adalah tingkat atau volume penyebaran penyakit yang tergolong paling tinggi. Suatu penyakit dapat dikatakan pandemi apabila telah menyebar secara cepat ke seluruh belahan dunia dengan tingkat infeksi yang tinggi. Berdasarkan catatan sejarah, sejumlah pandemi telah beberapa kali terjadi di dunia, seperti cacar, dan tuberculosis. Infeksi COVID-19 bukanlah pandemi yang pertama kali terjadi, pada waktu sebelum saat ini, dunia sudah melewati beberapa pandemi, seperti pandemi flu babi akibat virus H1N1 pada 2009. Pada saat itu flu babi menginfeksi sekitar 1,4 miliar orang di seluruh dunia dan membuat ratusan ribu orang meninggal dunia. Kemudian pada tahun 1918-1920, penduduk dunia juga mengalami pandemi *Black Flag* atau *Black Death*. Pandemi ini menewaskan lebih dari setengah populasi Benua Eropa saat itu (Baharuddin & Sulfati, 2020).

Menurut situs WHO, virus corona (COVID-19) adalah keluarga besar virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan dan manusia. Virus ini dinyatakan sebagai pandemi oleh WHO pada tanggal 11 Maret 2020. Virus corona atau COVID-19 adalah keluarga besar virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. *Coronavirus* adalah sekumpulan virus dari subfamily *Orthocoronavirus* dalam keluarga *Coronavirus* dan *Ordo Nidovirales*. Kelompok virus ini menyebabkan penyakit pada burung dan mamalia, termasuk manusia (Yunus & Rezki, 2020).

2.1.6.2 Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi *Coronavirus Disease* 2019 atau COVID-19 sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebab COVID-19. Pembatasan sosial ini dilakukan terhadap pergerakan orang maupun barang untuk satu Provinsi atau Kabupaten/Kota tertentu. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka percepatan penanganan *Coronavirus Disease* 2019 atau COVID-19 disebut bahwa PSBB dilakukan dengan pertimbangan epidemiologis, besarnya ancaman, efektifitas, dukungan sumberdaya teknis operasional, pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan (Casman, 2020).

Pedoman teknis Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 mengenai pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka percepatan penanganan COVID-19. Kriteria PSBB adalah jumlah kasus dan jumlah kematian akibat penyakit meningkat dan

menyebarkan secara signifikan dan cepat ke beberapa wilayah dan terdapat kaitan epidemiologi dengan kejadian yang serupa di wilayah yang lain. Pengusulan PSBB disertai dengan data peningkatan jumlah kasus menurut waktu, penyebaran kasus menurut waktu dan kejadian transmisi lokal. Kasus adalah pasien dalam pengawasan dan kasus terkonfirmasi positif berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium. Kesiapan pemerintah daerah melaksanakan PSBB dilihat pula dari aspek ketersediaan kebutuhan hidup dasar rakyat, sarana dan prasarana kesehatan, anggaran dan operasional jaringan pengamanan sosial dan aspek keamanan. Selain itu pemerintah harus konsisten dalam mendorong dan mensosialisasikan pola hidup bersih dan sehat kepada masyarakat.

2.1.6.3 Dampak Pandemi COVID-19

Pandemi COVID-19 memberikan dampak yang cukup signifikan dalam penurunan kualitas hidup manusia dalam berbagai aspek, baik fisik, psikologi, maupun lingkungan. Dampak langsung dari pandemi COVID-19 terjadi di aspek kesehatan. Pada aspek kesehatan pandemi COVID-19 adalah tingginya jumlah kasus positif dan kematian akibat COVID-19. WHO menyatakan bahwa 17 bulan sejak kasus infeksi pertama di Wuhan China, COVID-19 sudah menjadi wabah di lebih dari 220 negara dengan kasus positif berjumlah 160 juta jiwa dengan kematian mencapai 31 juta orang menurut WHO (2021). Tingginya jumlah kasus positif COVID-19 membuat sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah dikonsentrasikan untuk penanganan pandemi COVID-19 menjadi terhambat (Whitehead, 2021). Selain itu, penurunan pelayanan kesehatan juga

dipengaruhi oleh sikap pengguna layanan kesehatan yang merasa khawatir untuk mengakses layanan kesehatan.

Selain memberikan dampak di bidang kesehatan, pandemi COVID-19 juga memberikan dampak besar di segala aspek kehidupan. Namun demikian dampak yang cukup dirasakan oleh dampak dalam bidang ekonomi. Seluruh Negara yang mengalami pandemi COVID-19 akan mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi dengan tingkat yang berbeda, bergantung pada kebijakan yang dijalankan dan jumlah penduduk (Wren-Lewis, 2020). Perlambatan ekonomi pada masa pandemi COVID-19 utamanya disebabkan oleh perubahan penyaluran dan permintaan akan barang dan jasa karena kebijakan pembatasan kebijakan yang dijalankan (Asare Vitenu-Sackey & Barfi, 2021).

Perlambatan ekonomi yang terjadi pada masa pandemi COVID-19 ini selanjutnya menyebabkan peningkatan pengangguran serta kemiskinan. Menyatakan bahwa pandemi COVID-19 juga menyebabkan penurunan pendapatan yang diikuti meningkatnya penduduk miskin. Penduduk miskin merupakan kelompok yang paling utama terkena dampak pandemi COVID-19.

2.1.7 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan hasil dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang berhubungan dengan permasalahan penelitian yang akan dilakukan penulis. Penelitian terdahulu bertujuan untuk membandingkan dan memperkuat atas hasil analisis yang dilakukan. Ringkasan penelitian terdahulu terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti, Tahun, dan Judul	Variabel Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
1	Nugraha Adhi Swardhika (2021) Analisis Sektor Pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2010-2019 di Provinsi Jawa Barat	Independen: jumlah wisatawan, tingkat hunian hotel, jumlah rumah makan dan restoran Dependen: pendapatan asli daerah	Variabel bebas yaitu jumlah wisatawan, jumlah rumah makan dan restoran	Variabel bebas yaitu tingkat hunian hotel dan data yang digunakan adalah data time series	Jumlah wisatawan berpengaruh positif signifikan, sedangkan tingkat hunian hotel, jumlah rumah makan dan restoran berpengaruh positif tidak signifikan.
2	Qorina Novitri, Junaidi dan M. Safri (2014) Determinasi Penerimaan Daerah dari Sektor Pariwisata di Kabupaten/Kota Provinsi Jambi	Independen: kamar hotel, PDRB sektor pariwisata atas dasar harga konstan, restoran dan rumah makan, rata-rata lama menginap, dan wisatawan Dependen: penerimaan daerah dari sektor pariwisata	Variabel bebas yaitu restoran dan rumah makan, rata-rata lama menginap, wisatawan, dan data yang digunakan yaitu data panel	Variabel bebas yaitu kamar hotel, PDRB sektor pariwisata atas dasar harga konstan, variabel terikat penerimaan daerah dari sektor pariwisata	PDRB sektor pariwisata atas dasar harga konstan, restoran dan rumah makan, rata-rata lama menginap berpengaruh signifikan, sedangkan jumlah kamar hotel tidak berpengaruh signifikan.

No	Peneliti, Tahun, dan Judul	Variabel Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
3	Sarta Kapang, Ita Pingkan Rorong, Mauna TH .B. Maramis (2019) Analisis Pengaruh Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Manado	Independen: tingkat hunian hotel, jumlah wisatawan, PDRB Dependen: PAD	Variabel bebas yaitu jumlah wisatawan, variabel terikat PAD	Variabel bebas yaitu tingkat hunian hotel, PDRB, dan data yang digunakan adalah data time series	Tingkat hunian hotel berpengaruh positif signifikan, jumlah wisatawan berpengaruh positif dan tidak signifikan, dan produk domestik regional bruto berpengaruh positif dan signifikan.
4	Devilian Fitri (2014) Pengaruh Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Pesisir Selatan	Independen: jumlah wisatawan, sarana akomodasi, tempat belanja Dependen: PAD	Variabel bebas yaitu jumlah wisatawan, variabel terikat PAD	Variabel bebas yaitu sarana akomodasi, tempat belanja, dan data yang digunakan adalah data time series	Jumlah Wisatawan tidak berpengaruh positif dan signifikan, sarana akomodasi dan tempat belanja berpengaruh positif dan signifikan.
5	Febriani Indah Nur Hikmawati (2019) Peran Sektor Pariwisata Terhadap	Independen: jumlah hotel, jumlah wisatawan, jumlah objek	Variabel bebas yaitu jumlah wisatawan, variabel terikat pendapatan	Variabel bebas yaitu jumlah hotel, jumlah objek	Jumlah hotel, PDRB berpengaruh positif dan signifikan, jumlah wisatawan

No	Peneliti, Tahun, dan Judul	Variabel Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
	Pendapatan Asli Daerah (PAD) di 35 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2018	wisata, PDRB Dependen: pendapatan asli daerah	asli daerah dan data yang digunakan yaitu data panel	wisata, PDRB	berpengaruh positif akan tetapi tidak signifikan, jumlah objek wisata tidak signifikan dan berpengaruh negatif.
6	Aldian Rizal Adjiputranda (2019) Analisis Pengaruh Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah Menurut Tinjauan Perspektif Ekonomi Islam di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011-2017	Independen: jumlah wisatawan, jumlah hotel, jumlah objek wisata Dependen: pendapatan asli daerah	Variabel bebas yaitu jumlah wisatawan, variabel terikat pendapatan asli daerah dan data yang digunakan yaitu data panel	Variabel bebas yaitu jumlah hotel, jumlah objek wisata	Jumlah wisatawan, jumlah hotel memiliki pengaruh yang signifikan, sedangkan jumlah objek wisata tidak memiliki pengaruh signifikan.
7	Luqman Yumna Fauzi (2018) Analisis Pengaruh Sektor Pariwisata	Independen: produk domestik regional bruto, jumlah penduduk,	Variabel bebas yaitu jumlah wisatawan, variabel terikat pendapatan	Variabel bebas yaitu produk domestik regional bruto, jumlah	PDRB, jumlah penduduk berpengaruh signifikan, jumlah objek wisata tidak berpengaruh

No	Peneliti, Tahun, dan Judul	Variabel Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
	Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah	jumlah objek wisata, jumlah wisatawan Dependen: pendapatan asli daerah	asli daerah dan data yang digunakan yaitu data panel	penduduk, dan jumlah objek wisata	signifikan, jumlah wisatawan berpengaruh negatif signifikan.
8	Fakhrul Indra Hermansyah (2017) Analisis Pengaruh Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sinjai	Independen: jumlah wisatawan, tingkat infrastruktur, objek wisata Dependen: PDRB dan PAD	Variabel bebas yaitu jumlah wisatawan, variabel terikat PAD	Variabel bebas yaitu tingkat infrastruktur, objek wisata, variabel terikat PDRB, dan data yang digunakan adalah data time series	Jumlah wisatawan dan tingkat infrastruktur berpengaruh positif signifikan melalui variabel PDRB, sedangkan Jumlah Objek Wisata tidak memiliki pengaruh signifikan melalui variabel PDRB.
9	Fernanda Arraniry (2018) Analisis Pengaruh Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Nusa	Independen: jumlah hotel, jumlah wisatawan, panjang jalan, PDRB Dependen: PAD	Variabel bebas yaitu jumlah wisatawan, variabel terikat PAD dan data yang digunakan yaitu data panel	Variabel bebas yaitu jumlah hotel, panjang jalan, PDRB	Jumlah hotel dan PDRB berpengaruh positif signifikan, jumlah wisatawan berpengaruh negatif dan tidak signifikan,

No	Peneliti, Tahun, dan Judul	Variabel Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
	Tenggara Barat Tahun 2012-2016				panjang jalan berpengaruh positif dan tidak signifikan.
10	Abdurrahman Habiebie Alghifari (2018) Pengaruh Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013- 2016	Independen: jumlah wisatawan, jumlah hotel dan akomodasi, jumlah tingkat hunian kamar, jumlah rata-rata lama menginap Dependen: pendapatan asli daerah	Variabel bebas yaitu jumlah wisatawan, jumlah rata-rata lama menginap, variabel terikat pendapatan asli daerah, data yang digunakan yaitu data panel	Variabel bebas yaitu jumlah hotel dan akomodasi, jumlah tingkat hunian kamar	Jumlah wisatawan, jumlah hotel dan akomodasi berpengaruh positif dan signifikan, tingkat hunian kamar, rata-rata lama menginap tamu berpengaruh negatif dan tidak signifikan.

2.2 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah konsep untuk mengungkapkan dan menentukan persepsi serta keterkaitan antara variabel yang akan diteliti dengan teori-teori yang telah dipaparkan dalam tinjauan pustaka. Mengacu pada teori yang ada, maka garis besar penelitian ini yaitu melihat hubungan antara jumlah wisatawan, jumlah restoran dan rumah makan, rata-rata lama menginap tamu, serta pandemi covid-19

terhadap pendapatan asli daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2017-2021.

2.2.1 Hubungan antara Jumlah Wisatawan dengan Pendapatan Asli Daerah

Wisatawan dapat memberikan efek positif terhadap sisi ekonomi menurut (Leiper, 1990) mulai pendapatan dari valuta asing, pendapatan dari bisnis atau usaha pariwisata, penyerapan tenaga kerja, menyehatkan neraca perdagangan luar negeri, dan pendapatan pemerintah melalui pajak yang harus dibayarkan. Semakin banyak wisatawan berkunjung dan lama menginap maka uang yang akan dibelanjakan tentu semakin banyak selama berwisata. Tingginya kegiatan konsumtif akan memberikan efek pendapatan yang diterima pemilik industri pariwisata sehingga nantinya akan meningkatkan jumlah penerimaan pajak dan retribusi yang merupakan salah satu komponen dari Pendapatan Asli Daerah seperti pajak hotel, restoran, retribusi daerah, retribusi parkir, dan lain-lain.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Abdurrahman Habibie Alghifari (2018) yang menyatakan bahwa jumlah wisatawan berpengaruh signifikan dan memiliki korelasi positif dengan PAD Jawa Barat dalam periode penelitian.

2.2.2 Hubungan antara Jumlah Restoran dan Rumah Makan dengan Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Pariwisata adalah sumber penerimaan objek pariwisata yang berasal dari retribusi tiket masuk, retribusi parkir dan pendapatan lain-lain yang sah berasal dari Destinasi Pariwisata. Menurut UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa, yang digunakan untuk

membiayai penyelenggaraan pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah. Perbedaan antara pajak dan retribusi daerah adalah terletak pada timbal balik langsung. Pada pajak tidak ada timbal balik langsung, sedangkan untuk retribusi ada timbal balik langsung.

Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan atau minuman dengan dipungut bayaran yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering. Usaha Rumah Makan atau Restoran merupakan sektor yang paling potensial karena setiap orang yang berwisata pasti membutuhkan makan dan minum yang tidak dapat dihentikan. Rumah Makan dan Restoran dapat menyumbang pendapatan melalui pajak dan retribusi atas pelayanan yang disediakan pemerintah daerah bagi para wisatawan.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Devilian Fitri (2014) yang menyatakan bahwa sarana akomodasi memiliki hubungan positif dan berpengaruh signifikan terhadap PAD Kabupaten Pesisir Selatan.

2.2.3 Hubungan antara Rata-Rata Lama Menginap Tamu dengan Pendapatan Asli Daerah

Pajak sebagai salah satu kewajiban yaitu menyerahkan sebagian kekayaan ke kas negara sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan umum (Djajaningrat dalam Tjahjono dan Husein, 2005). Pajak Hotel adalah salah satu sumber daya yang dipungut dari suatu daerah. Menurut undang-undang nomor 28 tahun 2009 pasal 1 ayat 20 dan 21, pajak hotel ialah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.

Pertumbuhan jumlah wisatawan yang menginap di hotel bintang maupun non bintang akan memberikan penambahan pajak hotel bagi daerah kunjungan wisatawan tersebut. Semakin lama menginap tamu maka tempat seperti hotel/vila akan mendapatkan keuntungan lebih besar. Jika keuntungan besar maka membayar pajak akan lebih besar sehingga pendapatan daerah akan semakin meningkat.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Qorina Novitri, Junaidi, M. Safri (2014) yang menyatakan bahwa rata-rata lama menginap memiliki hubungan positif dan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan daerah dari sektor pariwisata.

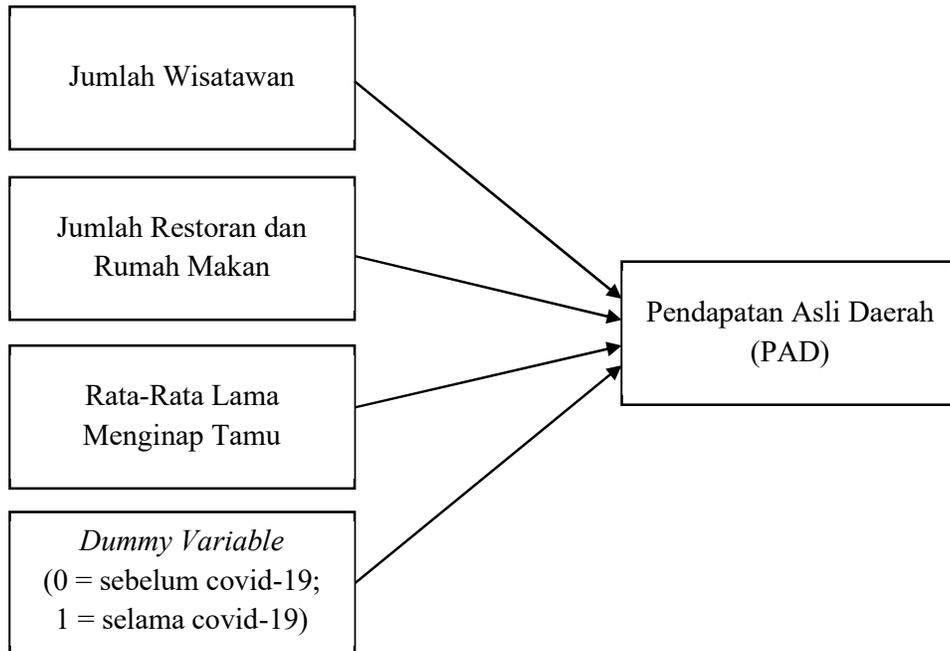
2.2.4 Hubungan antara Pandemi Covid-19 dengan Pendapatan Asli Daerah

Coronavirus Disease adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome Corona Virus 2* (SARS-CoV-2). Penyakit yang mudah menular dan mematikan yang terinfeksi ini telah mewabah di hampir seluruh dunia. Melihat perkembangan yang terjadi pada beberapa hari terakhir, dengan banyaknya kasus infeksi Covid-19 di Indonesia, nampaknya dampak lokal dari penyebaran Covid-19 justru akan jauh lebih besar. Penyakit ini mulai merebak pada penghujung tahun 2019, dan telah ditetapkan sebagai *global pandemic* oleh *World Health Organization* (WHO) (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2020).

Pandemi Covid-19 menyebabkan gangguan pada rantai pasok global, dalam negeri, volatilitas pasar keuangan, guncangan permintaan konsumen dan dampak negatif di sektor- sektor utama seperti perjalanan dan pariwisata. Dampak wabah Covid19 tidak diragukan lagi akan terasa di seluruh rantai nilai pariwisata. Perusahaan kecil dan menengah diperkirakan akan sangat terpengaruh. Tekanan pada industri pariwisata sangat terlihat pada penurunan yang besar dari kedatangan

wisatawan mancanegara dengan pembatalan besar-besaran dan penurunan pemesanan. Penurunan juga terjadi karena perlambatan perjalanan domestik, terutama karena keengganan masyarakat Indonesia untuk melakukan perjalanan, khawatir dengan dampak Covid-19. Penurunan bisnis pariwisata dan perjalanan berdampak pada usaha UMKM, dan terganggunya lapangan kerja. Padahal selama ini pariwisata merupakan sektor padat karya yang menyerap lebih dari 13 juta pekerja. Angka itu belum termasuk dampak turunan atau multiplier effect yang mengikuti termasuk industri turunan yang terbentuk di bawahnya (Sugihamretha, 2020). Hal ini berimplikasi pada proporsi sumber pendapatan asli daerah yang dapat dipungut oleh pemerintah daerah.

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, membuktikan bahwa jumlah wisatawan, jumlah restoran dan rumah makan, rata-rata lama menginap tamu, serta pandemi covid-19 berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2017-2021. Secara lebih rincinya, kerangka pemikiran tersebut dapat dilihat pada gambar 2.3.



Gambar 2.3
Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis

Hipotesis merupakan pendapat sementara dan pedoman serta arah dalam penelitian yang disusun berdasarkan pada teori terkait, dimana suatu hipotesis selalu dirumuskan dalam bentuk pernyataan yang menghubungkan dua variabel atau lebih (Supranto, 1997).

Berdasarkan teori dan hasil studi terdahulu yang telah dilakukan, adanya hipotesis untuk memberikan gambaran mengenai penelitian yang di lakukan penulis, yang selanjutnya agar dapat diuji kebenarannya dengan menggunakan data yang telah ada. Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, maka penulis menentukan hipotesis sebagai berikut:

1. Diduga jumlah wisatawan, jumlah restoran dan rumah makan, rata-rata lama menginap tamu, serta pandemi covid-19 secara parsial berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2017-2021.
2. Diduga jumlah wisatawan, jumlah restoran dan rumah makan, rata-rata lama menginap tamu, serta pandemi covid-19 secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2017-2021.